

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya kapitalisme di Indonesia dapat diindikasikan berawal dari peristiwa kapal dagang dari negeri Belanda tiba di Banten pada tahun 1596, pada mulanya Belanda datang untuk membeli barang kemudian membawa dan menjual barang-barang tersebut seperti rempah-rempah ke Eropa. Dalam perjalanannya, karena keunggulan teknologi, akses informasi pasar dan organisasi, para pedagang Eropa mendominasi pasar besar. Kemudian, para pedagang Eropa berangkat dari dorongan keuntungan yang tinggi daripada sekedar berdagang biasa melakukan imperialisme dengan menggunakan keunggulannya untuk mendominasi kawasan ini secara teritorial. Hal tersebut yang pada kemudian hari mengilhami berdirinya kongsi dagang Belanda yaitu *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) dan mulai melakukan monopoli pasar serta penjajahan di Indonesia yang pada saat itu masih dikenal sebagai Nusantara.¹ Pada saat inilah dimana awal dari kapitalisme memasuki Nusantara.

Seiring berjalannya waktu, dominasi VOC semakin meluas dengan diberikannya hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak monopoli, mencetak mata uang, hingga mengadakan perjanjian politik. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, kekuasaan kolonial diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda yang kemudian menerapkan beberapa kebijakan ekonomi

¹ Boediono, *Ekonomi Indonesia: Dalam Lintas Sejarah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016): 31-35.

seperti sistem tanam paksa. Selanjutnya sistem ini memperkuat pola eksploitasi ekonomi terhadap rakyat dan semakin memperdalam kapitalisme kolonial yang mengutamakan keuntungan untuk perusahaan-perusahaan dan pemerintah kolonial.²

Soekarno dalam pidatonya yang termuat dalam buku Indonesia Menggugat, kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari ini cara produksi, yang oleh karenanya, menjadi sebabnya nilai lebih (kelebihan hasil yang diterima majikan dari produksi kaum buruh) tidak jatuh di dalam tangan kaum buruh melainkan jatuh di dalam tangan kaum majikan. Kapitalisme oleh karenanya menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi kapital, sentralisasi kapital dan *industriële Reserve-Armee* (barisan penganggur).³

Indonesia tahun 1960-an pada masa ekonomi terpimpin memasuki kondisi perekonomian yang tidak stabil. Tahun 1963 tim survei Amerika Serikat yang datang ke Indonesia menyatakan bahwa: “Indonesia hidup dengan makan modalnya, tidak berhasil memelihara dan mempertahankan peralatan modalnya tetap baik, tidak berhasil melakukan peremajaan perkebunan karet, minyak dan kebun sawit”. Sektor bidang industri juga mengalami kesulitan di mana investasi lebih kecil di bidang barang-barang industri konsumsi ringan yang ditinggalkan untuk pelaku bisnis swasta hanya mampu memasok barang-barang

² Tri Widodo, “From Dutch Mercantilism to Liberalism: Indonesian Historical Perspective”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 21, No.4 (Oktober 2006): 340.

³ *Indonesia Menggugat: Pledoi Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial Belanda* (Jakarta: Penerbit PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru), Juni 2001): 7-8.

kebutuhan dalam jumlah yang sedang. Sejak 1961, industri ini hampir seluruhnya habis karena tidak adanya kapasitas harga, pasokan dan peraturan pemerintah. Bidang industri yang diambil alih oleh pemerintah atau didanai secara tidak langsung melalui BIN dan koperasi hasilnya sangat mengecewakan, sebagian besar pabrik yang dijalankan sangat jauh di bawah kapasitasnya.⁴ Pemerintahan Soekarno mempertahankan modal kapitalis, sementara itu juga mencoba mengekangnya dengan berbagai regulasi, seperti: kontrol ketat terhadap arus kapital asing dan niaga ekspor-impor, nasionalisasi yang terbatas, UU Pokok Agraria 1960, kontrol harga dan sebagainya. Terdapat unsur kecil yang murni sosialis pada masa Ekonomi Terpimpin, lebih bersifat ke kapitalisme.⁵

Pemerintahan memainkan peranan yang penting dalam pembentukan dan perkembangan kapitalisme di Indonesia pascakolonial. Pengaruhnya bersifat menentukan, termasuk memberikan kondisi politik bagi pertumbuhan kapitalis, menyediakan kerangka fiskal serta investasi kapital yang besar. Dalam proses perkembangannya, tentulah memerlukan penjelasan mengenai langkah dan kebijakan negara yang menyangkut hubungan antar negara, ekonomi dan masyarakat dalam konteks Indonesia. Gambaran yang menonjol dari Orde Baru pada tahun-tahun pertamanya, dikenal tersentralisasi dan disingkirkannya partai-partai politik dari partisipasi efektif dalam proses pengambilan keputusan, berdampak pada tidak adanya mekanisme yang

⁴ Kyunghoon Kim, "Key Features of Indonesia's State Capitalism Under Jokowi", *Journal of ASEAN Studies* (2022): 208-209

⁵ Richard Robison, *Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012): 66- 77.

jelas, dominasi politik atau pengaruh terhadap negara dari kelas atau koalisi manapun.⁶ Serta pada berlangsungnya era Orde Baru diketahui bahwa praktik demokrasi terpimpin masih berlanjut dalam membangun korporasi organisasi politik yang diprakarsai oleh negara yang di dalamnya terdapat kegiatan korporasi yang berkepentingan sosial dan ekonomi dimana korporasi tersebut bekerja sebagai badan pengontrol, mobilisasi dan pelindung politik di kalangan buruh, bisnis, layanan publik, pemuda dan lain sebagainya.⁷

Orde Baru menerima pandangan bahwa negara di atas politik sebagai suatu justifikasi ideologi yang penting terhadap keabsahannya dan suatu senjata kuat dalam menghadapi kritik. Terdapat dua kritik terhadap pembagian artifisial yang bersifat politik dan ekonomi. *Pertama*, kebijakan dan filosofi ekonomi dipandang sebagai ekonomi objektif oleh para ekonom konservatif Barat yang diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1965-1967. *Kedua*, kebijakan ekonomi membentuk basis filsafat ekonomi pasar bebas yang lebih dari sekadar pembenahan segera terhadap dilema fiskal dan moneter Indonesia pada pertengahan 1960-an. Hal tersebut merupakan basis yang diperlukan untuk rehabilitasi, penguatan dan ekspansi dari susunan masyarakat kapitalis.⁸

Keterkaitan antara etika Islam dengan kapitalisme mencakup perbandingan prinsip moral dalam etika Islam dengan sistem ekonomi kapitalis. Diantara keduanya menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem memiliki

⁶ *Ibid*, Hal: 83-84.

⁷ Vishnu Juwono, "The Perils and Challenges of Advancing Economic Governance Reform in Indonesia: An Endeavor by the Technocrats in the New Order Era", *Atlantis Press* Vol. 167 (2017): 128.

⁸ Robison, *Soeharto & Bangkitnya...* Hal: 85-87.

tujuan yang berbeda namun berpotensi untuk memadukan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam praktik kapitalis. Etika merupakan suatu hal yang harus berdampingan dengan ekonomi, terlebih etika didasari oleh ajaran agama. Jika di Barat etika merujuk pada alkitab, maka etika ekonomi Islam merujuk pada Al-Qur'an, ajaran didalamnya tidak pernah melarang untuk mencari kekayaan dengan cara yang halal, namun juga mengedukasi seorang muslim untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.⁹

Di antara prinsip utama dalam etika Islam yang selaras untuk menilai suatu sistem perekonomian adalah *al'adl*, yaitu keadilan. Keadilan dalam etika Islam yang menyangkut dua aspek dimensi yang meliputi dimensi individual dan sosial. Nilai ini kemudian menjadi inti dalam mewujudkan kesejahteraan menurut syariat. Sistem ekonomi berdasarkan Islam dibangun atas dasar agama dengan tujuan *falah* yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana sistem ekonomi sekuler tidak berlaku di sistem ekonomi Islam.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kebijakan perekonomian 1960-1970?
2. Bagaimana kapitalisme 1960-1970 di pandang dari etika Islam?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Choirul Huda, "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam)", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.7, No. 1 (2016): 41.

¹⁰ Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual", *Islamic Economics Journal* Vol. 6, No. 1 (Juni 2020): 64-66.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan perekonomian Indonesia antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1970, serta menganalisis pandangan etika Islam dari prinsip *al-'adl* terhadap perkembangan kapitalisme pada masa tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan memahami sistem serta kebijakan perekonomian Indonesia pada tahun 1960 hingga 1970. Penelitian ini akan menelusuri karakteristik kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah pada kedua periode tersebut serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai arah dan corak sistem ekonomi Indonesia selama dekade 1960-an.
2. Menganalisis bentuk-bentuk kapitalisme yang berkembang di Indonesia pada tahun 1960 hingga 1970 dari sudut pandang etika Islam prinsip *al-'adl*. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi akan dianalisis dalam konteks nilai-nilai Islam, terutama terkait prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini juga akan mengulas sejauh mana praktik kapitalisme pada masa tersebut sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif etis keislaman dalam menilai transformasi ekonomi pada masa tersebut.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode tahapan penting yang

dilakukan dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah.¹¹ Helius Sjamsuddin mengatakan bahwa sejarawan harus menggunakan ilmu metodologi pada tempat yang seharusnya sehingga dapat diketahui bagaimana mengetahui suatu peristiwa sejarah.¹² Tahapan-tahapan dalam penelitian, diantaranya adalah: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan sejarah).¹³

Pertama, pemilihan topik. Dalam penelitian ini menentukan topik bahasan merupakan hal yang diperlukan guna penelitian.¹⁴ Kemudian, diperlukan pengevaluasian apakah topik tersebut sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal demikian guna memberikan sudut pandang yang baru. Penelitian juga mempertimbangkan apakah topik tersebut memiliki daya tarik, karena topik yang menarik dapat membangun semangat dalam penelitian. Dengan demikian judul penelitian ini adalah Islam Dan Kapitalisme: Tinjauan Korelasi Etika Islam Perekonomian Indonesia 1960-1970.

Kedua, heuristik. Adalah tahapan awal dalam metode penelitian sejarah, mengumpulkan sumber-sumber dalam berbagai bentuk yang biasanya tersebar

¹¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, Agustus 2003).

¹² Anton Dwi Laksono, *Apa Itu Sejarah; Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian* (Pontianak Selatan: Derwati Press, 2018): 91.

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018): 72.

¹⁴ Wulan Juliani Sukmana, "Metode penelitian Sejarah", *Seri Publikasi Pembelajaran* Vol. 1 No. 2 (2021): 2-3.

berupa catatan, kesaksian, arsip dan lainnya.¹⁵ Pada tahap ini, pencarian literatur-literatur kepustakaan yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mengenai tinjauan korelasi etika Islam perekonomian Indonesia pada tahun 1960-1970. Pada tahap ini sumber-sumber sejarah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer yaitu informasi atau keterangan yang didapatkan secara langsung, sumber primer pada penelitian ini di dapat dari majalah lama Sketmasa yang di dapat dari perpustakaan swasta Medayu Agung yang berlokasi di Surabaya, sedangkan sumber primer berikutnya diperoleh dari bapak Budi Kastowo S.E. mengenai kapitalisme dan Islam, yang merupakan salah satu pegawai di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang bertempat di layanan Literatur Bung Karno. Sementara sumber sekunder berasal dari pihak yang tidak melihat secara langsung, sumber sekunder di dapat dari buku Indonesia Menggugat: Pledoi Bung Karno di Hadapan Pengadilan Kolonial Belanda dan buku karya Richard Robison dengan judul Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, kemudian beberapa jurnal yang salah satunya berjudul Ekonomi Islam Dan Kapitalisme (Menurut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam) karya Choirul Huda. Kedua sumber sangatlah diperlukan guna memperoleh data, baik yang berbentuk tulisan maupun yang lisan.

Ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern.¹⁶ Kritik analisis fokus intern dilakukan

¹⁵ Anton Dwi Laksono, *Apa Itu Sejarah...* Hal: 94.

¹⁶ M. Dien Madjid dan Johan Wahyu, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Depok:

dengan mempertimbangkan konteks sejarah serta tujuan penelitian yang dapat mempengaruhi izin sumber tersebut. Sedangkan kritik ekstern menilai aspek fisik sumber data, seperti waktu penerbitan. Penelitian disini melakukan verifikasi dengan memastikan bahwa sumber yang digunakan agar sebanding dengan objek penelitian serta membandingkan sumber-sumber yang telah diperoleh dan dianalisis untuk memastikan keakuratan dan kevaliditasnya.

Keempat, Interpretasi yang merupakan tahap lanjutan setelah kritik sumber. Setelah fakta-fakta disusun, barulah dilakukan interpretasi. Interpretasi sangat esensial dan krusial dalam metodologi sejarah. Kemudian penelitian ini berusaha menyusun dan menggabungkan fakta-fakta yang telah berhasil dikumpulkan dengan sumber sejarah, sehingga membentuk suatu cerita peristiwa sejarah.¹⁷ Hasil interpretasi menunjukkan bahwa intervensi militer dalam ekonomi menimbulkan model kapitalisme karena ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan hasil distribusi yang tidak merata.

Kelima, historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, dilakukan setelah melalui tahap heuristik, verifikasi dan interpretasi. Penulisan sejarah sendiri merupakan representasi kesadaran penulis sejarah.¹⁸ Pada fase ini, pemaparan dalam penelitian ini ditujukan untuk menyajikan hasil secara utuh, mulai dari penjabaran definsi kapitalisme, kapitalisme di Indonesia tahun 1960-1970, hingga pandangan etika Islam mengenai kapitalisme tersebut.

Prenamedia, Januari 2018): 106-108.

¹⁷ M. Dien Madjid dan Johan Wahyu, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar...* Hal: 109

¹⁸ *Ibid*, hal: 230-231.

Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi dalam batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal pada penelitian ini adalah 1960-1970. Batasan temporal pada tahun 1960-1970 diambil karena dalam kurun waktu dasawarsa tersebut pemerintahan Orde Lama mengalami peralihan ke pemerintahan Orde Baru, demikian dapat menjadi perbandingan mengenai kapitalisme yang berkembang pada dua periode tersebut. Batasan spasial pada penelitian ini dilakukan di Indonesia.